



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, diperlukan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif dan kronologis yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan klasifikasi arsip;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, penyusutan Arsip dengan cepat dan tepat.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok Pencipta Arsip yang meliputi
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan

fungsi pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

- (4) Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klasifikasi Arsip terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
 - b. Klasifikasi Arsip substantif.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. hukum;
 - d. kerja sama;
 - e. teknologi informasi;
 - f. hubungan masyarakat;
 - g. perpustakaan;
 - h. kearsipan;
 - i. perlengkapan;
 - j. kerumahtanggaan;
 - k. klinik;
 - l. keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan;
 - m. kepegawaian;
 - n. organisasi dan tatalaksana; dan
 - o. pengawasan.
- (2) Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberdayaan pemuda;
 - b. pengembangan pemuda;
 - c. pembudayaan olahraga; dan
 - d. peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) memuat:
 - a. kode Klasifikasi Arsip; dan
 - b. jenis Arsip.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip yang menggunakan kombinasi huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan Arsip aktif, dan Arsip inaktif serta penyusutan Arsip.
- (4) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1018



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

I. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

KODE KLASIFIKASI ARSIP		JENIS ARSIP
PR	PERENCANAAN	
	00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
	00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
	00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
	00.02	Rencana Strategis (Renstra)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
	01	Program Kerja Tahunan
	01.00	Program Kerja Tahunan Unit Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan unit organisasi (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja/ <i>Term of Reference</i> (KAK/TOR)) dan data dukung dari unit organisasi serta berkas penelaahan unit organisasi
	01.01	Program Kerja Tahunan Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus)
	02	Penetapan Kontrak Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kinerja pegawai
	03	Penyusunan Rencana Anggaran
	03.00	Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran termasuk seluruh dokumen penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Standar Biaya Khusus (SBK)

	03.01	Revisi Dokumen Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi dokumen anggaran termasuk revisi Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), revisi Petunjuk Operasional (PO), Anggaran Biaya Tambahan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan
	04	Laporan
	04.00	Laporan Insidental
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan insidental
	04.01	Laporan Berkala
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan berkala termasuk laporan bulanan unit organisasi, laporan triwulanan unit organisasi, laporan semesteran unit organisasi, laporan tahunan unit organisasi dan laporan tahunan Kementerian
	04.02	Laporan Akuntabilitas Kinerja Lakin/LKJ
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) unit organisasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian
	05	Evaluasi Program dan Kinerja
	05.00	Evaluasi Program dan Kinerja Unit Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja unit organisasi
	05.01	Evaluasi Program dan Kinerja Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja unit organisasi Kementerian
	06	Internalisasi Reformasi Birokrasi
	06.00	Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan peta jalan reformasi birokrasi Kementerian; koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
	06.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
	06.02	Koordinasi Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pengelolaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian
KU	KEUANGAN	
	00	Pelaksanaan Anggaran
	00.00	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), meliputi surat undangan, notulen rapat, draft Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), draf Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

	00.01	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) meliputi surat undangan, notulen rapat, draft Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan formulir pembiayaan kegiatan/Rencana Anggaran Belanja (RAB).
01		Pengeluaran Anggaran
	01.00	Belanja Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran yang melekat pada belanja pegawai (akun 51) dan kelengkapannya termasuk pembayaran gaji, tunjangan, uang lembur, uang duka dan uang makan dari proses pengajuan anggaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
	01.01	Belanja Barang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa yang melekat pada belanja barang (akun 52) termasuk dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kontrak serta dokumen-dokumen pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terdiri dari: belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja barang Badan Layanan Umum (BLU), belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah
	01.02	Belanja Modal
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran belanja modal termasuk dokumen pelaksanaan pengadaan, kontrak serta dokumen-dokumen pembayarannya, terdiri dari: belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, modal lainnya (<i>software</i> , Arsip, benda purbakala, dan lain-lain) serta belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)
	01.03	Belanja Bantuan Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berkaitan dengan pengeluaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat
	01.04	Perbaikan/Pemulihan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan perbaikan/pemulihan anggaran seperti surat pengajuan ralat Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengajuan pemulihan anggaran, dan lain-lain
02		Pengelolaan Perbendaharaan
	02.00	Perbendaharaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (SPM), Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran (BP)

	02.01	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik berupa Penerimaan Non Pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sampai pengaturan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP melalui Maksimum Pencairan Dana (MP)
	02.02	Kartu Pengawasan Kredit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran
	02.03	Pajak
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan pembayaran pajak, surat setoran pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT)
	02.04	Pengembalian Belanja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
	02.05	Berita Acara Pemeriksaan Kas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas
	02.06	Pembukaan Rekening
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukaan rekening berupa surat persetujuan pembukaan rekening, daftar buku rekening, dan rekonsialisasi rekening dengan Kementerian Keuangan
	02.07	Pembukuan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan
	02.08	Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR), meliputi laporan penyelesaian, laporan pemantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
03		Pengelolaan Administrasi Keuangan
	03.00	Keterangan Penghasilan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterangan penghasilan
	03.01	Permohonan Pinjaman
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman
	03.02	Iuran Keanggotaan Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan organisasi
	03.03	<i>Speciment</i> Tanda Tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>speciment</i> tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara

		Pengeluaran (BP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
	03.04	Penghentian Pembayaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghentian pembayaran
	03.05	Iuran Keanggotaan Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan iuran keanggotaan dalam organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri
	04	Bantuan Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan luar negeri meliputi daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri (<i>blue book</i>), dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>green book</i>), dokumen Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan dokumen sejenisnya, dokumen <i>loan agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), <i>legal opinion</i> , perjanjian penerusan pinjaman dan surat menyurat dengan lender, alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri, alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri, laporan hutang negara, ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri
	05	Layanan Keuangan
	05.00	Administrasi Perbendaharaan dan Penggajian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi
	05.01	Koordinasi Keuangan (Rekonsiliasi)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi keuangan (Rekonsiliasi)
	05.02	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan
	05.03	Sosialisasi Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi keuangan
	06	Akuntansi dan Pelaporan
	06.00	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berupa buku manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), kebijakan akuntansi (Surat Keputusan Sekretaris Kementerian/Peraturan Menteri), Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi (<i>database</i>), laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
	06.01	Perhitungan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja/ <i>Term of Reference (KAK/TOR)</i>
	06.02	Laporan Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan keuangan berupa laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan laporan neraca
	06.03	Evaluasi Laporan Keuangan

			Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi laporan keuangan berupa laporan evaluasi satuan kerja
		06.04	Pemantauan Pelaksanaan Pelaporan Keuangan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan berupa dokumen akuntansi keuangan, berita acara pemeriksaan kas, kas/register penutupan kas, Arsip Data Komputer (ADK), berita acara rekonsiliasi antara satuan kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan laporan
	07	Verifikasi Anggaran	
		07.00	Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kementerian
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran sekretariat Kementerian
		07.01	Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Kedeputian
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran kedeputian
HK	HUKUM		
	00	Program Legislasi	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian yaitu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Penyusunan (Progsun)
	01	Produk Hukum	
		01.00	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk hukum yang bersifat pengaturan seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran dan lain-lain
		01.01	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk hukum yang bersifat penetapan seperti Keputusan Menteri, Keputusan Eselon I, dan lain-lain
	02	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir
	03	Dokumentasi dan Informasi Hukum	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum
	04	Kasus Hukum	
		04.00	Perkara Perdata
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan kasus hukum perkara perdata
		04.01	Perkara Pidana/Pendampingan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkara pidana/pendampingan
		04.02	Perkara Tata Usaha Negara (TUN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perkara Tata Usaha Negara (TUN)
		04.03	Perkara Arbitrase
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkara arbitrase

	04.04	Perkara Pengadilan Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkara pengadilan khusus
	04.05	Perkara Uji Materiil
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkara uji materiil
	04.06	Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)
		naskah-naskah yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
	04.07	Konsultasi Hukum dan Pendapat Hukum
		naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum
	05	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Kesadaran Hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan kesadaran hukum/payung hukum
	06	Hak Kekayaan Intelektual
	06.00	Hak Cipta
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cipta
	06.01	Hak Kekayaan Industri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang
	07	Telaah Hukum
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah hukum, telaah peraturan perundangan, dan telaah masalah umum
	08	Rekomendasi
	08.00	Usulan pewarganegaraan/naturalisasi
		naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan pewarganegaraan/naturalisasi
	08.01	Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
		naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga aset/milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
	08.02	Penggunaan Logo Kementerian dan Nomenklatur Menteri/Kementerian
		naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi penggunaan logo Kementerian, nomenklatur Menteri/Kementerian pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
	08.03	Kemudahan
		naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian kemudahan antara lain memperoleh pendidikan, pekerjaan, bea masuk, bea keluar, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), lalu lintas keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing, pengecualian Larangan dan/atau Terbatas (LARTAS), impor sementara, pembentukan badan perkumpulan kepemudaan dan keolahragaan dan kegiatan terkait kepemudaan dan keolahragaan
KS	KERJA SAMA	
	00	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)

		00.00	Dalam Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/memorandum yang dilaksanakan dengan pihak dari dalam negeri
		00.01	Luar Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/memorandum yang dilaksanakan dengan pihak dari luar negeri
	01	Penyusunan dan Advokasi Kebijakan Pengelolaan Kerja Sama	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan advokasi kebijakan pengelolaan kerja sama	
	02	Perencanaan dan Pemetaan Potensi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan pemetaan potensi kerja sama dalam negeri dan luar negeri	
	03	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri	
	04	Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Operator Aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian administrasi operator aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)	
	05	Pengoordinasian Partisipasi Pemerintah dalam Mengikuti Forum-Forum Kepemudaan dan Keolahragaan Internasional	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengoordinasian partisipasi pemerintah dalam mengikuti forum-forum kepemudaan dan keolahragaan internasional	
	06	Kerja Sama di Bidang Kepemudaan	
		06.00	Dalam Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> yang dilaksanakan dengan pihak dari dalam negeri di bidang kepemudaan
		06.01	Luar Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> yang dilaksanakan dengan pihak dari luar negeri di bidang kepemudaan
	07	Kerja Sama di Bidang Keolahragaan	
		07.00	Dalam Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dilaksanakan dengan pihak dari dalam negeri di bidang keolahragaan
		07.01	Luar Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> yang dilaksanakan dengan pihak dari luar negeri di bidang keolahragaan
TI	TEKNOLOGI INFORMASI		
	00	Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> Pembangunan Sistem Informasi	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis/ <i>master plan</i> pembangunan sistem informasi	
	01	Kebijakan Teknologi Informasi	
		01.00	Kebijakan Aplikasi

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan aplikasi
	01.01	Kebijakan Infrastruktur
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan infrastruktur
	02	Aplikasi Berbasis Elektronik
	02.00	Pembangunan Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi
	02.01	Pengembangan Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi
	02.02	Pemeliharaan Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan aplikasi
	02.03	Manual Penggunaan Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi
	03	Pengelolaan Data/Informasi
	03.00	Pengumpulan Data
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan data, permintaan kepada pemilik data, dan penerimaan data
	03.01	Penyusunan Basis Data
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan basis data
	03.02	Penyajian informasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyajian informasi
	03.03	Penyebarluasan Data
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyebarluasan data
	04	Infrastruktur
	04.00	<i>Data Centre</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>data centre</i>
	04.01	<i>Hardware</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>hardware</i>
	04.02	<i>Software</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>software</i>
	04.03	<i>Networking</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>networking</i>
	05	Keamanan Data
	05.00	<i>Backup Data</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>backup data</i>
	05.01	<i>Anti Virus</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>anti virus</i>
	05.02	<i>Firewall</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>firewall</i>
	06	Dokumen <i>Hosting</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen <i>hosting</i> meliputi formulir permintaan <i>hosting</i> , laporan hasil uji kelayakan, dan laporan pelaksanaan <i>hosting</i>
	07	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan implementasi SPBE di Kementerian
	08	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi aplikasi
HM	HUBUNGAN MASYARAKAT	
	00	Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
	00.00	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ <i>hearing</i> dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
	00.01	Lembaga Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.
	00.02	Organisasi Nasional dan Organisasi Internasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar organisasi nasional dan organisasi internasional.
	00.03	Perusahaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perusahaan
	00.04	Organisasi Sosial kemasyarakatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan organisasi sosial kemasyarakatan
	00.05	Perguruan Tinggi/Sekolah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah
	00.06	Hubungan dengan Media Massa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan media massa
	00.07	Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
	01	Pengelolaan Informasi Publik
	01.00	Pelayanan informasi publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik Kemenpora kepada pihak eksternal maupun internal Kemenpora seperti surat/formulir informasi publik, tanda terima informasi publik, hasil koordinasi terkait permintaan informasi publik, surat persetujuan/penolakan informasi publik, surat dari atasan mengenai keberatan permohonan informasi, daftar register pemohon informasi publik
	01.01	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan keberatan informasi publik atau penyelesaian sengketa informasi publik
	01.02	Daftar Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar informasi publik
	01.03	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan klasifikasi informasi yang dikecualikan
	01.04	Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan layanan informasi publik
	01.05	Laporan Kepuasan Layanan Informasi Publik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kepuasan layanan informasi publik
	02	Penerbitan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran
	03	Peliputan dan Dokumentasi
	03.00	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Menteri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan <i>shooting</i>)
	03.01	Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan selain Menteri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi selain Menteri (Pimpinan Tinggi Madya ke bawah)
	04	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan
	04.00	Penyampaian Informasi Melalui Media Cetak
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi melalui media cetak seperti kliping koran, brosur leaflet/poster/plakat, dan pengumuman
	04.01	Penyampaian Informasi Melalui Media Sosial dan <i>Website</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi melalui media sosial dan <i>website</i> resmi Kementerian
	05	Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Pembuatan Spanduk dan Iklan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pameran/sayembara/lomba/festival/ pembuatan spanduk dan iklan
	06	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan/tanda kenang-kenangan
	07	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf
PU	PERPUSTAKAAN	
	00	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
	00.00	Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan deposit bahan pustaka yaitu bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit
	00.01	Administrasi Pengelolaan Deposit Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan deposit bahan pustaka yaitu administrasi pengelolaan deposit bahan pustaka
	01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
	01.00	Buku Induk Koleksi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku induk koleksi

	01.01	Daftar Buku Terseleksi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar buku terseleksi
	02	Preservasi Bahan Pustaka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan preservasi bahan pustaka
	03	Akreditasi Perpustakaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan akreditasi perpustakaan
KA	KEARSIPAN	
	00	Kebijakan Pengelolaan Arsip
	00.00	Tata Naskah Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan tata naskah dinas
	00.01	Klasifikasi Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Klasifikasi Arsip
	00.02	Jadwal Retensi Arsip (JRA)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
	00.03	Sistem Klasifikasi dan Akses Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip.
	00.04	Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman pengelolaan Arsip Dinamis
	00.05	Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan kearsipan lainnya
	01	Penciptaan Arsip
	01.00	Pengurusan Surat Masuk
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk
	01.01	Pengurusan Surat Keluar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar
	02	Pengelolaan Arsip Dinamis
	02.00	Pengelolaan Arsip Aktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip aktif
	02.01	Pengelolaan Arsip Inaktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip inaktif
	02.02	Pengelolaan Arsip Vital
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip vital
	02.03	Pengelolaan Arsip Terjaga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip terjaga
	02.04	Alih Media/Digitalisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan alih media/digitalisasi
	02.05	Autentikasi Arsip Dinamis

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan autentikasi Arsip Dinamis meliputi kegiatan autensitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas Arsip Dinamis atau surat pernyataan penciptaan Arsip
	02.06	Sumber Daya Kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan sumber daya kearsipan
	03	Preservasi Arsip Dinamis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan preservasi Arsip Dinamis, vital, dan terjaga
	04	Penyusutan Arsip
	04.00	Pemindahan Arsip Inaktif
		Naskah-Naskah yang berkaitan dengan pemindahan Arsip inaktif
	04.01	Pemusnahan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna
	04.02	Penyerahan Arsip Statis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyerahan Arsip statis
	05	Layanan Peminjaman Arsip
	05.00	Ketentuan Peminjaman
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketentuan peminjaman
	05.01	Proses Peminjaman
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses peminjaman
	05.02	Layanan Penggandaan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penggandaan Arsip
	06	Pembinaan Kearsipan
	06.00	Bimbingan dan Konsultasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan dan konsultasi
	06.01	Bimbingan Teknis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis
	06.02	Sosialisasi/ <i>Workshop</i> /Seminar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi/ <i>workshop</i> /seminar
	07	Penghargaan Kearsipan
	07.00	Arsiparis Teladan Tingkat Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan arsiparis teladan tingkat nasional
	07.01	Arsiparis Teladan Tingkat Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan arsiparis teladan tingkat Kementerian
	07.02	Apresiasi/Penghargaan Kearsipan Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan apresiasi/penghargaan kearsipan lainnya
	08	Publikasi Arsip
	08.00	Informasi Arsip Tematik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi Arsip tematik

	08.01	Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
		Naskah-Naskah yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
	08.02	Pameran Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan ekshibisi/pameran Arsip
	08.03	Naskah Sumber Arsip/Buku
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah sumber Arsip/buku
	08.04	Diorama
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan diorama
09		Penelusuran Arsip
	09.00	Dalam Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan dalam negeri
	09.01	Luar Negeri
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan luar negeri
10		Pengawasan Kearsipan
	10.00	Pengawasan Kearsipan Eksternal
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal
	10.01	Pengawasan Kearsipan Internal
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan internal
11		Organisasi Kearsipan
	11.00	Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)
	11.01	Forum Komunikasi Arsiparis dan Pengelola Arsip Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum komunikasi arsiparis dan pengelola Arsip Kementerian
PL		PERLENGKAPAN
	00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	00.00	Analisis Kebutuhan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit organisasi
	00.01	Tata Ruang
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor
	00.02	Daftar Perkenalan Mampu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Kementerian
	01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	01.00	Pengadaan Langsung
		Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bernilai kurang dari 200 juta, mulai dari permintaan/usulan sampai dengan pengajuan tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa
	01.01	Penunjukan Langsung

			Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas 200 juta dan bersifat langsung, mulai dari permintaan/usulan sampai dengan pengajuan tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa
		01.02	Tender
			Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bernilai lebih dari 200 juta, mulai dari permintaan/usulan sampai dengan pengajuan tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa
		01.03	Tender Cepat
			Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas 200 juta dan bersifat mendesak, mulai dari permintaan/usulan sampai dengan pengajuan tagihan pembayaran pengadaan barang/jasa
		01.04	<i>E-Catalog</i>
			Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-catalog</i>
	02	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	
		02.00	Penatausahaan Barang Milik Negara
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dari proses pencatatan sampai pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
		02.01	Penyimpanan/Pergudangan Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang dari gudang
		02.02	Distribusi /Penyaluran Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi Barang Milik Negara (BMN) untuk kepentingan intern maupun ekstern
		02.03	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian, termasuk buku inventaris
		02.04	Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bernilai sejarah sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya
		02.05	Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya.
		02.06	Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
		02.07	Pembinaan/Pengamanan/Pengawasan Barang Milik Negara (BMN)
			Naskah-Naskah yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan aplikasi Barang Milik Negara (BMN),

			pengawasan fisik Barang Milik Negara (BMN) diseluruh satuan kerja
	03	Pemeliharaan	
		03.00	Pemeliharaan/Perawatan Fasilitas Kantor
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan <i>server/hosting</i> , serta kebersihan taman, jalan dan lingkungan kantor
RT	KERUMAHTANGGAAN		
	00	Perjalanan Dinas	
		00.00	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke dalam negeri
		00.01	Perjalanan Dinas Luar Negeri
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan <i>passport</i> , visa, dan tiket pesawat
	01	Fasilitas	
		01.00	Kendaraan Dinas
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas dan laporan kehilangan kendaraan
		01.01	Ruang Rapat/Konsumsi
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya
		01.02	Telekomunikasi
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon)
	02	Pengamanan	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/ <i>security</i> , buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan Kementerian dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir
KL	KLINIK		
	00	Pengelolaan Layanan Kesehatan Pegawai dan <i>Stakeholder</i>	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan layanan kesehatan pegawai dan <i>stakeholder</i>
	01	Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kesehatan	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan
	02	Pemanfaatan Barang Persediaan Klinik	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang persediaan klinik
PT	KEPROTOKOLAN DAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN		
	00	Keprotokolalan	
		00.00	Penyelenggaraan Acara dan Upacara
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara dan upacara
		00.01	Pengamanan Pimpinan

			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan pimpinan
		00.02	Penyiapan Akomodasi Pimpinan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan akomodasi pimpinan
		00.03	Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Tamu Pimpinan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan penerimaan tamu pimpinan
	01		Ketatausahaan Pimpinan
		01.00	Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan
		01.01	Pelayanan Pimpinan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan pimpinan
		01.02	Pelaksanaan Fasilitas Rapat Pimpinan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas rapat pimpinan
KP	KEPEGAWAIAN		
	00		Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
		00.00	Usulan Formasi
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit organisasi yang disertai dengan analisa jabatan dan beban kerja
		00.01	Usulan Permintaan Formasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan formasi termasuk didalamnya rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan
		00.02	Persetujuan/Penetapan Formasi
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan persetujuan/penetapan formasi
		00.03	Penetapan Formasi Khusus
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus termasuk di dalamnya usulan formasi khusus
	01		Pengadaan Pegawai
		01.00	Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan dan berkas lamaran yang tidak diterima
		01.01	Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan
		01.02	Prajabatan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan
		01.03	Penempatan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian
	01.04	<i>Open Bidding</i> (Seleksi Jabatan Terbuka)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>open bidding</i> (seleksi jabatan terbuka) calon pejabat di lingkungan Kementerian
	02	Mutasi
	02.00	Kenaikan Pangkat/Golongan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Aparatur Sipil Negara (ASN)
	02.01	Kenaikan Gaji Berkala
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara (ASN)
	02.02	Penyesuaian Masa Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji
	02.03	Penyesuaian Tunjangan Keluarga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga
	02.04	Penyesuaian Kelas Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
	02.05	Rotasi Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas
	02.06	Alih Tugas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, dan pegawai yang diperbantukan
	02.07	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai
	02.08	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
	03	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
	03.00	Pengangkatan Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural termasuk di dalamnya pelantikan
	03.01	Pemberhentian Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan
	04	Pendelegasian Wewenang
	04.00	Pelaksana Tugas (Plt)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Tugas (Plt)
	04.01	Pelaksana Harian (Plh)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Harian (Plh)
	05	Administrasi Pegawai

	05.00	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan, dan pelatihan)
	05.01	Cuti Alasan Penting
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti karena alasan penting
	05.02	Cuti Besar dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara
	05.03	Dokumentasi Identitas Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang Usul Penetapan Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)/Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P), Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	05.04	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	05.05	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan dan pengendalian
	06	Pengembangan Karir
	06.00	Pendidikan dan Pelatihan/Kursus Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan/kursus pegawai yang meliputi perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan, pelaksanaan, pelaporan, ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/sertifikat
	06.01	Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat/jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	06.02	Ujian Penyesuaian Ijazah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan ujian penyesuaian ijazah
	06.03	Penyesuaian Gelar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian gelar
	06.04	Pengelolaan Sistem Merit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem merit
	06.05	Pengelolaan Manajemen Talenta
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen talenta
	06.06	Pengelolaan Assesment Centre
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan <i>assesment centre</i>
	06.07	Pengelolaan Budaya Kerja Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan budaya kerja organisasi
	06.08	Tugas Belajar

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas belajar
07	Penilaian Kompetensi	
	07.00	Berkas Penilaian Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penilaian kompetensi pegawai
	07.01	Hasil Penilaian Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kompetensi
08	Pembinaan Pegawai	
	08.00	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	08.01	Angka Kredit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian angka kredit pegawai, meliputi pengajuan daftar usul penetapan angka kredit, penilaian daftar usul penetapan angka kredit pegawai
	08.02	Pelanggaran Disiplin
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin termasuk di dalamnya penegakan disiplin dan peningkatan disiplin pegawai
	08.03	Kode Etik Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kode etik pegawai
09	Status dan Kedudukan Pegawai	
	09.00	Pertimbangan Status Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan status kepegawaian meliputi analisis status kepegawaian dan penyusunan pertimbangan status kepegawaian
	09.01	Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan kedudukan kepegawaian meliputi analisis kedudukan kepegawaian dan penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian
	09.02	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
	09.03	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa pegawai
10	Sistem Informasi Kepegawaian	
	10.00	Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data informasi kepegawaian meliputi pengolahan data (pengelolaan <i>database</i> kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelesaian permasalahan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)) dan Informasi kepegawaian meliputi penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi, pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik
	10.01	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi
	10.02	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan Arsip kepegawaian meliputi Arsip kepegawaian elektronik (verifikasi dan distribusi Arsip kepegawaian serta pengelolaan Arsip kepegawaian elektronik) dan Arsip kepegawaian fisik
	11	Kesejahteraan Pegawai
	11.00	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
	11.01	Layanan Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan asuransi pegawai/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
	11.02	Layanan Tabungan Perumahan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan tabungan perumahan
	11.03	Layanan Bantuan Sosial
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan sosial
	11.04	Layanan Pakaian Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas
	11.05	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pegawai yang meninggal karena dinas
	11.06	Pemberian Tali Kasih
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tali kasih
	11.07	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa
	11.08	Layanan Olahraga dan Rekreasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan olahraga dan rekreasi
	11.09	<i>Medical Record</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>Medical Record</i>
	12	Pemberhentian Pegawai
	12.00	Dengan Hormat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)
	12.01	Tidak Dengan Hormat
		Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pemberhentian

	12.02	Pemberhentian Sementara	
			Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan sementara, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pemberhentian
	13	Pensiun	
	13.00	Administrasi Pensiun Pejabat Negara	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pensiun pejabat negara meliputi administrasi pensiun pejabat negara, perekaman, dan pemeliharaan data pensiun
			Administrasi Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), perekaman, dan pemeliharaan data pensiun
	13.01	Penetapan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
	13.02	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan pertimbangan teknis pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
	13.03	Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Duda	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pejabat negara dan janda/dudanya yang meliputi administrasi pensiun pejabat negara, penyiapan pensiun pejabat negara, dan penetapan pensiun janda/duda pejabat negara
	14	Berkas Perseorangan	
	14.00	Berkas Perseorangan Menteri Pemuda dan Olahraga	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Menteri Pemuda dan Olahraga
	14.01	Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi berkas lamaran yang diterima, nota penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kelengkapannya, nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hasil pengujian kesehatan, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) peninjauan masa kerja, Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan, Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional, Surat Keputusan (SK) perpindahan wilayah kerja, Surat Keputusan (SK) perpindahan antar instansi, Surat Keputusan (SK) Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), berita acara pemeriksaan, SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS, Surat Keputusan (SK) perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk, Surat Keputusan (SK) penarikan kembali dari perbantuan/dipekerjakan, Surat Keputusan (SK) pemberian uang tunggu, Surat Keputusan (SK) pembebasan dari jabatan

		organik karena diangkat sebagai pejabat negara, Surat Keputusan (SK) pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara, surat keterangan pernyataan hilang, surat keterangan kembalinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan hilang, SK penggantian nama, surat perbaikan tanggal tahun kelahiran, akta nikah/cerai, akta kelahiran, isian formulir Pendataan Ulang PNS (PUPNS), berita acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatan, surat permohonan menjadi anggota Partai Politik (Parpol), surat keterangan mutasi keluarga, surat keterangan meninggal dunia/hilang, surat keterangan peningkatan pendidikan, penetapan angka kredit jabatan fungsional, surat keterangan hasil penelitian khusus, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri, surat izin bepergian ke luar negeri, Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) Pegawai Negeri Sipil (PNS), ijazah/sertifikat, Surat Keputusan (SK) penempatan/penarikan pegawai, Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk, surat pertimbangan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organik karena dicalonkan sebagai kepala/wakil kepala daerah, Surat Keputusan (SK) pensiun
OT	ORGANISASI DAN TATALAKSANA	
	00	Organisasi
	00.00	Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi serta uraian tugas fungsi organisasi
	00.01	Evaluasi Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kemempora serta layanan rekomendasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pemuda dan olahraga
	00.02	Analisis Jabatan Struktural
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan, pengusulan, dan penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional
	00.03	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan, pengusulan, dan penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional
	00.04	Standar Kompetensi Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kamus kompetensi teknis bidang pemuda dan olahraga dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian
	00.05	Evaluasi Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penentuan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

	01	Tatalaksana	
		01.00	Perumusan, Pembahasan, Penetapan, dan Evaluasi Proses Bisnis
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi yang dilengkapi dengan diagram, peta proses, peta sub proses, dan peta lintas fungsi
		01.01	Perumusan, Pembahasan, Penetapan, dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis tentang kegiatan rutin yang dapat dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram alir dan alur kerja (<i>flowchart</i>)
		01.02	Sistem dan Mekanisme Kerja
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur dan tata kerja yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam suatu sistem
	02	Pelayanan Publik	
		02.00	Perumusan, Pembahasan, Penetapan, dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan bagi masyarakat, termasuk dokumen standar pelayanan, maklumat pelayanan serta penyelenggaraan forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat
		02.01	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik
PW	PENGAWASAN		
	00	Audit	
		00.00	Audit Kinerja
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, dan pelaporan
		00.01	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan dan pelaporan
		00.02	<i>Probity Audit</i>
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>probity audit</i> yang meliputi surat penugasan dan pelaporan
		00.03	Audit Operasional
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit operasional
		00.04	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	01	Reviu	
		01.00	Reviu Laporan Keuangan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rewiu laporan keuangan (semesteran dan tahunan), meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	01.01	Rewiu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rewiu RKAKL, revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)/anggaran, buka blokir, <i>refocusing</i> anggaran, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	01.02	Rewiu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan rewiu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	01.03	Rewiu Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rewiu lainnya (selain rewiu Laporan Keuangan (LK) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)), antara lain pelaksanaan rewiu rencana kerja Barang Milik Negara (BMN), rewiu Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), aspek kinerja tertentu, aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan hasil kajian pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	02	Evaluasi
	02.00	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi surat penugasan dan surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	02.01	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) meliputi surat penugasan
	02.02	Evaluasi Efektivitas Kepatuhan Satuan Kerja Internal (SKI)/Satuan Pengawas Internal (SPI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi efektivitas kepatuhan Satuan Kerja Internal (SKI)/Satuan Pengawas Internal (SPI) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	03	Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian melalui berbagai media
	04	Daftar Hitam
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar hitam yang datang dari internal maupun eksternal Kementerian
	05	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan

		dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) seperti laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, Surat Keputusan (SK) tanggung jawab mutlak (surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, Surat Keputusan (SK) penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
	06	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan
	07	Program Pencegahan Korupsi
		07.00 Pengendalian Gratifikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai dengan pelaporan
		07.01 Pembangunan Zona Integritas (ZI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) (Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
		07.02 Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
		07.03 Program Pencegahan Korupsi Lainnya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan program pencegahan korupsi lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan
	08	Kegiatan Pengawasan Lainnya
		08.00 Konsultasi dan Pembimbingan Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan
		08.01 Rapat Kerja/Koordinasi/Sosialisasi Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat kerja/koordinasi pengawasan yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber sampai dengan pelaporan
		08.02 Kebijakan Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan pengawasan, pedoman pengawasan, petunjuk pelaksanaan pengawasan, petunjuk teknis pengawasan dan lain-lain yang meliputi surat penugasan, nota dinas sampai dengan pelaporan
		08.03 Perencanaan Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), <i>roadmap</i> pengawasan yang meliputi penyusunan kegiatan, nota dinas sampai dengan pelaporan
		08.04 Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Forum komunikasi lainnya

			Naskah-naskah yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam forum besar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya
--	--	--	---

II. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

KODE KLASIFIKASI ARSIP		JENIS ARSIP	
DP	PEMBERDAYAAN PEMUDA		
	00	Karakter Pemuda	
		00.00	Peningkatan Nilai Keimanan dan Ketakwaan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan nilai keimanan dan ketakwaan pemuda, antara lain meliputi peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda, penumbuhan moderasi beragama pemuda, peningkatan ketahanan mental-spiritual pemuda, dan penguatan moralitas dan etika pemuda
		00.01	Penumbuhan Kesadaran Pemuda terhadap Bahaya Destruktif
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penumbuhan kesadaran pemuda terhadap bahaya destruktif, meliputi pornografi, pornoaksi, prostitusi, <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS)</i> , kekerasan pemuda, perdagangan manusia, pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
		00.02	Penyediaan Data di Bidang Karakter Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang karakter pemuda
	01	Peningkatan Wawasan Pemuda	
		01.00	Wawasan, Pertahanan, dan Keamanan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan program-program pelatihan wawasan, pertahanan, dan keamanan pemuda meliputi penguatan ideologi pancasila, pencegahan paham radikalisme, dan penguatan pembinaan kesadaran bela negara di kalangan pemuda
		01.01	Wawasan Politik dan Hukum Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan wawasan politik dan hukum pemuda meliputi penumbuhan kesadaran atas tanggung jawab hak dan kewajiban pemuda sebagai warga negara, penumbuhan partisipasi pemuda dalam pembangunan politik, dan penumbuhan kesadaran hukum pemuda
		01.02	Wawasan Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan wawasan sosial, budaya lingkungan hidup meliputi penumbuhan kesadaran atas nilai-nilai sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi sosial pemuda di masyarakat, peningkatan peran pemuda dalam ketahanan budaya nasional, dan pelestarian lingkungan hidup
		01.03	Penyediaan Data di Bidang Wawasan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang wawasan pemuda
	02	Potensi Kemandirian Pemuda	

	02.00	Perluasan Akses Pendidikan Formal Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan (<i>knowledge</i>) pemuda melalui jalur pendidikan formal, perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan formal, dan perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh dan meningkatkan pendidikan formal
	02.01	Perluasan Akses Pendidikan Non-Formal Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan (<i>skill</i>) pemuda melalui jalur pendidikan non-formal, perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan non-formal dan perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh dan meningkatkan keterampilan melalui jalur pendidikan non-formal
	02.02	Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui penumbuhan kreativitas pemuda di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital
	02.03	Perintisan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepemudaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perintisan dan pembinaan jabatan fungsional kepemudaan
	02.04	Penyediaan Data di Bidang Potensi Kemandirian Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang potensi kemandirian pemuda
03		Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
	03.00	Organisasi Kepelajaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi kepelajaran
	03.01	Organisasi Kemahasiswaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi kemahasiswaan
	03.02	Organisasi Kepemudaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan program pengembangan kelembagaan organisasi kepemudaan, fasilitasi pelatihan manajemen organisasi kepemudaan, fasilitasi kepemudaan, dan kemah pengurus kepemudaan
	03.03	Pembinaan Gerakan Pramuka
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan dan fasilitasi pengembangan organisasi kepramukaan (kwartir nasional/kwartir daerah/kwartir cabang)
	03.04	Penyediaan Data di Bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
04		Bina Sarana dan Prasarana Pemuda
	04.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan

	04.01	Penyusunan Standar Prasarana dan Sarana Kepemudaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar prasarana dan sarana kepemudaan
	04.02	Penyediaan Data di Bidang Prasarana dan Sarana di Bidang Kepemudaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang prasarana dan sarana di bidang kepemudaan
	05	Pemberian Penghargaan di Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan pemuda di bidang wawasan pemuda, potensi kemandirian pemuda, karakter pemuda, organisasi kepemudaan, dan kepramukaan serta bina prasarana dan sarana pemuda
PP	PENGEMBANGAN PEMUDA	
	00	Kepemimpinan Pemuda
	00.00	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda
	00.01	Peningkatan Partisipasi Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik, forum kepemudaan, organisasi, pengawasan implementasi kebijakan public, dan kegiatan sosial kemasyarakatan
	00.02	Penyediaan Data di Bidang Kepemimpinan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang kepemimpinan pemuda
	01	Kepeloporan Pemuda
	01.00	Pengembangan Kepeloporan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan kepeloporan pemuda meliputi kegiatan pelatihan, penelusuran, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda
	01.01	Pengembangan Potensi Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan potensi pemuda
	01.02	Peningkatan Partisipasi Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan tanggap bencana dan rawan sosial, kesukarelawanan, dan kepeloporan
	01.03	Pembinaan dan Pendampingan Pemuda Pelopor
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pemuda pelopor yang mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perantaraan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi
	01.04	Penyediaan Data di Bidang Kepeloporan Pemuda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang kepeloporan pemuda
	02	Kewirausahaan Pemuda
	02.00	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan
		02.01	Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda pengembangan kemampuan berwirausaha pemuda pengembangan mental/jiwa wirausaha pemuda pendampingan/advokasi/mentoring kewirausahaan pemuda penyediaan akses pendanaan/modal penyediaan akses pemasaran, dan pengembangan sentra kewirausahaan pemuda
		02.02	Penyediaan Data di Bidang Kewirausahaan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang kewirausahaan pemuda
	03		Kemitraan Pemuda
		03.00	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan
		03.01	Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN)
		03.02	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengorganisasian, pendampingan dan penyusunan pengelolaan Rencana Aksi Daerah (RAD)
		03.03	Koordinasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		03.04	Koordinasi dan Partisipasi Pemuda dalam Forum Kepemudaan Internasional
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengoorganisasian partisipasi pemuda dalam forum kepemudaan internasional
		03.05	Pelaksanaan Pertukaran Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pertukaran pemuda
		03.06	Penyediaan Data di Bidang Kemitraan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang kemitraan pemuda
	04		Pemberian Penghargaan Bidang Pengembangan Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan pemberian penghargaan di bidang kepemimpinan pemuda, wawasan pemuda, kemitraan pemuda, dan kepeloporan pemuda
	05		Hari Sumpah Pemuda
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda
BO	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		
	00		Pengelolaan Olahraga Pendidikan
		00.00	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan
			Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan untuk ditempatkan pada satuan pendidikan

	00.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelatihan Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga pada satuan pendidikan
	00.02	Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pada satuan pendidikan
	00.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
	00.04	Penyelenggaraan Festival/Pekan/Kejuaraan Olahraga Pendidikan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival/pekan/kejuaraan olahraga pendidikan
	00.05	Penyediaan Data di Bidang Olahraga Pendidikan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang olahraga pendidikan
01		Olahraga Masyarakat
	01.00	Pembinaan dan Pengembangan Pelatih/Instruktur Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga masyarakat
	01.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana olahraga masyarakat
	01.02	Pengembangan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga masyarakat berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal
	01.03	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar-Sanggar, Perkumpulan Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar serta perkumpulan olahraga masyarakat
	01.04	Pembinaan dan Pengembangan Festival dan Perlombaan Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
	01.05	Pengembangan Industri Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan industri olahraga melalui penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga masyarakat
	01.06	Peningkatan Pariwisata Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata olahraga melalui pengembangan industri olahraga dalam bentuk jasa penyelenggaraan festival olahraga masyarakat

	01.07	Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran indeks pembangunan olahraga
	01.08	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional, Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan, dan wisata
	01.09	Pengelolaan Promosi dan Pemassalan Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan promosi dan pemassalan olahraga
	01.10	Penyediaan Data di Bidang Olahraga Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang olahraga masyarakat
	02	Olahraga Penyandang Disabilitas
	02.00	Pengelolaan Promosi dan Pemassalan Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan promosi dan pemassalan olahraga penyandang disabilitas
	02.01	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan olahraga penyandang disabilitas
	02.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana olahraga penyandang disabilitas
	02.03	Penyelenggaraan Festival Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival olahraga penyandang disabilitas
	02.04	Pembinaan Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan organisasi olahraga penyandang disabilitas
	02.05	Penyediaan Data di Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang olahraga penyandang disabilitas
	03	Pemberian Penghargaan di Bidang Pembudayaan Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan di bidang olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga penyandang disabilitas
	04	Hari Olahraga Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hari Olahraga Nasional
PO	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	
	00	Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi
	00.00	Pemanduan dan Identifikasi Bakat Talenta Muda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanduan dan identifikasi bakat talenta muda
	00.01	Pembinaan dan Pengembangan Bakat Talenta Muda
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bakat talenta muda

	00.02	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah
	00.03	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Olahraga Penyandang Disabilitas Junior
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sentra olahraga penyandang disabilitas junior
	00.04	Kompetisi Olahragawan Junior Tingkat Nasional dan Internasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi olahragawan junior tingkat nasional dan internasional
	00.05	Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan sentra latihan olahragawan muda potensial nasional
	00.06	Penyediaan Data di bidang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi
	01	Olahragawan Andalan
	01.00	Pembinaan Olahragawan dan Para Olahragawan Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan olahragawan dan para olahragawan nasional
	01.01	Pengembangan Olahragawan dan Para Olahragawan Elit Junior dan Elit Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan olahragawan dan para olahragawan elit junior dan elit nasional
	01.02	Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Nasional dan Internasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi nasional dan internasional
	01.03	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi nasional
	01.04	Pengembangan Industri Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan industri olahraga melalui penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi
	01.05	Peningkatan Pariwisata Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata olahraga melalui pengembangan industri olahraga dalam bentuk jasa penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi
	01.06	Penyediaan Data di Bidang Olahragawan Andalan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang olahragawan andalan
	02	Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	02.00	Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga keolahragaan
	02.01	Pembinaan Organisasi Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan organisasi keolahragaan
	02.02	Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga
	02.03	Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan, dan standar pengelolaan organisasi keolahragaan
	02.04	Akreditasi Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan akreditasi keolahragaan meliputi program pendidikan dan/atau pelatihan, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga
	02.05	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan dan Kelayakan Organisasi Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan
	02.06	Penyediaan Data di Bidang Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan
03	Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	
	03.00	Penyusunan Standar Nasional Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional keolahragaan meliputi standar prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi, standar penyelenggaraan keolahragaan, standar penyelenggaraan olahraga professional, dan standar pelayanan minimal keolahragaan
	03.01	Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi akreditasi keolahragaan meliputi kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga
	03.02	Sertifikasi Kelayakan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi kelayakan prasarana dan sarana keolahragaan
	03.03	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi
	03.04	Penyediaan Data di Bidang Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan data di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga
04	Pemberian Penghargaan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

	Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan di bidang olahragawan andalan, sentra pembinaan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana dan sarana olahraga
--	---

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO